

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KETANGGUHAN MASYARAKAT DESA TANGGUH BENCANA DI PROVINSI RIAU

Ratih Setyo Rini¹, Puji Yuniarti², Wiwin Wianti³
Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta
ratih.rsr@bsi.ac.id

Submitted: 10th May 2021/ **Edited:** 28th June 2021/ **Issued:** 01st July 2021
Cited on: Rini, R. S., Yuniarti, P., & Wianti, W. (2021). PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KETANGGUHAN MASYARAKAT DESA TANGGUH BENCANA DI PROVINSI
RIAU. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting,
Management and Business*, 4(3), 588-597.

ABSTRACT

This research is descriptive qualitative with the aim of describing the Empowerment and Development of Community Resilience Activities in Disaster Resilient Villages in Riau Province. To get a complete picture and to be able to provide evaluations on several aspects of the assessment, monitoring of the implementation of activities is carried out through direct interviews with activity actors and reading literature through documents and reports on the implementation of activities. In general, all stages of Activities Empowerment and Development of Community Resilience in Disaster Resilient Villages has been carried out in Riau Province, namely in Siak Regency and Kampar Regency. In Siak Regency, activities were carried out in 3 (three) sub-districts and 3 (three) villages/kelurahan. Meanwhile in Kampar Regency, activities were carried out in 2 (two) sub-districts and 2 (two) villages/kelurahan. Empowerment and Development of Community Resilience in Disaster Resilient Villages in Riau Province. In general, it has achieved its objectives, but during the implementation of the activity stages, it has faced several problems. One suggestion for improving activities is to provide a budget for training (continuity) in forest fire control for government officials, village volunteers and forestry companies as well as communities around the forest.

Keywords: Monitoring, Evaluation, Disaster Resilient Village

PENDAHULUAN

Letak geologis Indonesia menjadikannya sebagai daerah rawan bencana. Pergerakan tiga lempeng tektonik aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng pasifik di bagian Barat, menyebabkan gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif. Keadaan ini diperburuk oleh perubahan iklim yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan perekonomian Indonesia yang memicu tumbuh suburnya pembangunan industri, pemukiman, perkebunan, tempat perbelanjaan, jalan, dan fasilitas umum lainnya hampir di seluruh wilayah Indonesia

menyebabkan makin banyaknya daerah rentan bencana banjir dan tanah longsor. Sesuai data yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga 2013, wilayah terjadinya bencana di Indonesia mengalami perluasan (<http://dibi.go.id>).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai mandatori Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bertanggungjawab terhadap berlangsungnya penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk mencapai visi Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana, BNPB menjalankan berbagai program pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Program peningkatan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan bencana. Pada tahun 2014, perkembangan pelaksanaan program tersebut menunjukkan adanya peningkatan, di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, antara lain telah terbentuknya 64 masyarakat tangguh bencana di 28 Provinsi dan 34 kabupaten/kota. Sementara pada tahun 2015 telah terbentuk masyarakat tangguh bencana di 31 Provinsi dan 45 kabupaten/kota. Dan pada tahun 2016, pembentukan masyarakat tangguh bencana dilaksanakan di 30 Provinsi dengan 50 kabupaten/kota. Pelaksanaan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi fokus tersendiri sehingga dibutuhkan monitoring dan evaluasi kegiatan.

LANDASAN TEORI

Monitoring

Monitoring atau Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin (Perpu RI Nomor 39 Tahun 2006; Ramadhani, 2019).

Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar (Perpu RI Nomor 39 Tahun 2006; Munthe, 2015). Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan Monitoring (Jaya, et, al., 2018). Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk

mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian (Hasbullah & Anam, 2019).

Desa Tangguh Bencana

Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012). Kriteria ketangguhan desa dari atas ke bawah adalah Desa Tangguh Utama, Desa Tangguh Madya, dan Desa Tangguh Pratama

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah, yang terletak pada suatu kawasan dan membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis. Sementara kebakaran hutan menurut Saharjo (2003), merupakan pembakaran yang penjarangan apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam seperti serasah, rumput, ranting /cabang pohon mati yang berdiri, log (kayu bulat), tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan dengan studi dokumentasi melalui pengumpulan data berbagai dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana (Destana) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain studi Pustaka tersebut, peneliti juga melakukan pengumpulan data secara langsung saat Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Destana, khususnya di Provinsi Riau. Guna melengkapi penelitian, dilakukan juga wawancara dengan berbagai pihak pelaksana kegiatan Destana di wilayah Barat, yaitu di Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, yang berada di Provinsi Riau

HASIL PENELITIAN

Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Wilayah Barat berfokus pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Wilayah Barat, khususnya di Provinsi Riau, berada di 2 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 kecamatan dan 5 Desa/Kelurahan. Secara terperinci lokasi kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Lokasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat di Provinsi Riau

Provinsi	Kota / Kabupaten	Kecamatan	Desa / Kelurahan
Riau	Siak	Siak	Rawang Air Putih
		Sungai Apit	Mengkapin
		Dayun	Dayun
	Kampar	Tapung	Karya Indah
		Kampar Kiri Hilir	Mentulik

Tahapan Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat di Provinsi Riau dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan, yaitu:

1. Sosialisasi Kabupaten, yaitu kegiatan untuk memperkenalkan program desa tangguh bencana kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Riau.
2. Sosialisasi Desa dan Pembentukan Pokja (Kelompok Kerja), yaitu kegiatan untuk memperkenalkan program desa tangguh bencana kepada para pemangku kepentingan di tingkat desa yang berada di Kabupaten Riau.
3. Kemitraan dengan Pihak Lain, yaitu kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain (BNPB, 2012)
4. Monitoring Kegiatan Destana oleh PJOK, yaitu Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan kegiatan.
5. Profil Desa / kelurahan, yaitu gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan

kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. (Mendagri RI, 2007)

Tabel 2. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Provinsi Riau (Kabupaten Kampardan Kabupaten Siak)

No	Kegiatan	Permasalahan	Analisis	Sarana
1	Sosialisasi Kabupaten	1. Materi yang disampaikan tentang Destana sangat sedikit dan singkat. 2. Pihak swasta tidak diundang. Peserta yang diundang hanya sesuai juknis.	Pada acara soskab semua pihak terkait diundang khususnya satgas penanggulangan karlahut, namun penyampaian materi pokok tentang destana oleh BPBD Propinsi sangat singkat bahkan sempat mengalami gangguan teknis (mati lampu). Selanjutnya acara lebih mengarah pada evaluasi karlahut.	1. Soskab agar dilaksanakan lebih panjang lagi waktunya dan apabila digabung dengan acara lain agar dibagi waktunya dalam sehari tersebut dari pagi sampai sore. 2. Mengundang juga pihak swasta yang ada di kabupaten. 3. Usulan secara komprihensif (menyikapi secara menyeluruh) terhadap terhadap kegiatan ini untuk perbaikan program Destana ke depan
2	Sosialisasi Desa dan pembentuk an Pokja	1. Partisipasi Warga dan kaum perempuan masih kurang 2. Keterlibatan perempuan dalam pokja masih kurang. Ada yang 5 ada yang 6 orang.	1. Pelaksanaan sosdes sudah mengundang warga bahkan undangannya setiap rumah. 2. Sebelum sosdes sudah dilakukan identifikasi orang2 yang akan masuk pokja dan saat sosdes diumumkan siapa saja yang menjadi pokja selain itu juga warga mengusulkan pokja.	1. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal mengumpulkan warga dib alai desa namun juga kepada Warga yang tidak hadir dan belum mengetahui program destana pada saat acara wirid yasin kaum ibu, pertemuan pkk, karangtaruna dsb. 2. Agar dalam sosdes diulang kembali berapa persen keterlibatan perempuan dalam pokja. 3. Disesuaikan jadwalnya dengan keadaan warga setempat kapan mereka sering rapat 4. Perlu dukungan dari pemerintah kabupaten (BPBD) guna kelangsungan hidup forum sebelum mereka bisa mandiri dan juga agar perempuan lebih semangat lagi untuk terlibat

No	Kegiatan	Permasalahan	Analisis	Sarana
3	Kemitraan dengan Pihak Lain	Menbangun Kemitraan dengan pihak lain	Kemitraan dengan pihak lain sudah terjalin, namun MOU belum di tanda tangani, pada saat soscab tidak diundang, kemitraan dengan swasta sudah ada namun dengan desa lain, dalam bentuk pelatihan.	1. Pihak swasta sudah melakukan kemitraan namun sifatnya insidentil 2. Membuat MOU dengan pihak swasta yang sudah sering memberikan bantuan agar ada kerjasama yang lebih intensif lagi
4	Monitoring kegiatan Destana oleh PJOK	Dalam hal ini PJOK sudah bekerja secara maksimal guna terlaksananya program Destana ini	PJOK dalam hal ini sangat berperan dalam terlaksananya kegiatan ini. PJOK benar-benar mencurahkan segenap kemampuannya guna membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi resiko dari sebuah bencana yang mungkin akan terjadi	1. Dalam hal monitoring kegiatan Destana oleh PJOK perlu ditambah staf yang bisa membantu PJOK dalam mengawasi dan memonitor semua proses apakah sudah benar sesuai dengan Juklak, jika belum mereka dapat mengarahkan agar sesuai dengan juklak, dalam hal ini bisa sedikit memperingan tugas dari PJOK. 2. Diperlukan individu – individu yang mau bekerja keras dalam melaksanakan monitoring kegiatan Destana ini
5	Profil Desa	Profil desa belum lengkap	Fasilitator kurang menggali lebih dalam lagi tentang profil desa terbaru, hanya berdasarkan dokumen yang ada di kantor desa (profil dari monografi desa / profil dari KKN}	3. Pada saat membuat peta kajian dapat digali lebih dalam lagi profilnya 4. Data dari hasil kajian dikompilasi dengan data dari sekdes

Capaian Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di Provinsi Riau dengan fokus bencana adalah kebakaran lahan dan hutan (karlahut). Kegiatan untuk mencapai tujuan Program Destana telah dapat dilakukan sepenuhnya meskipun menghadapi beberapa kendala pada tahap awalnya. Keterlambatan dana diantisipasi dengan strategi percepatan, untuk mengejar

ketertinggalan tahapan kegiatan. Percepatan dilakukan dengan menggabung kegiatan yang dapat digabung dalam satu kegiatan dan waktu kegiatan yang lebih dipadatkan. Percepatan juga dilakukan dengan melakukan kegiatan tidak hanya pagi/siang hari, tetapi juga sampai malam hari. Selama pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di Provinsi Riau, seluruh desa/kelurahan telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan utama, yaitu :

1. Koordinasi dan sosialisasi di kabupaten/kota
2. Persiapan pelaksanaan program di desa/kelurahan,
3. Pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan, dan
4. Seminar di kabupaten/kota untuk membangun keberlanjutan dan kerjasama para pihak serta
5. pelatihan relawan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota yang pesertanya berasal dari desa-desa yang difasilitasi.

Aspek Administrasi

Sistem pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana dilakukan melalui pelaporan berjenjang, dari laporan fasilitator, laporan forum di tingkat desa/kelurahan, dan laporan BPBD. Laporan yang dihasilkan ada 2 (dua), yaitu berupa laporan narasi kegiatan dan laporan keuangan. Pelaporan dilakukan baik secara formal (laporan tertulis / *hard cover*) maupun secara informal melalui kemudahan media komunikasi. Namun demikian laporan hanya dilakukan secara manual karena aplikasi *e-monev* masih dalam penyempurnaan.

Partisipasi

Keanggotaan pokja dan forum telah melibatkan semua perwakilan dan kelompok yang ada di wilayah desa/kelurahan tangguh bencana. Fasilitator secara umum memiliki pemahaman tentang konteks khas masyarakat desa lokasi Destana dan mampu menciptakan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat yang terlibat pada pertemuan-pertemuan yang diadakan. Pelibatan masyarakat dalam program Destana telah menumbuhkan keberanian dan memberikan peningkatan kapasitas terutama dalam berdialog dan menganalisis secara bersama persoalan kebencanaan.

Keterlibatan Perempuan (Kesetaraan Gender)

Dalam setiap program perlu adanya keseimbangan keterlibatan perempuan. Sebagian masyarakat Indonesia yang bias gender dimana perempuan lebih banyak berkuprah di ruang domestik, menyebabkan perempuan dan kelompok rentan yang menjadi korban bencana. Keberadaan perempuan dan anak-anak yang lebih banyak di rumah dapat menyulitkan mendapatkan akses informasi di saat bencana terjadi. Sementara laki-laki yang lebih banyak berperan di ruang publik menghadapi resiko yang lebih kecil. Sehingga melibatkan perempuan secara langsung dalam setiap proses upaya penanggulangan bencana menjadi suatu keharusan.

Pada kegiatan di Provinsi Riau, keterlibatan perempuan cukup terwakil, di mana dalam setiap kegiatan baik di level kabupaten maupun di desa tidak membatasi akses perempuan untuk terlibat sebagai anggota organisasi kelembagaan, dalam pokja maupun forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Keanggotaan perempuan dalam forum lebih maksimal karena lebih aktif menghadiri undangan pertemuan, tidak disibukkan dengan urusan di kantor. Diseminasi informasi oleh kalangan ibu-ibu di forum juga positif karena ibu-ibu juga terlibat dalam aktifitas keanggotaan di forum lainnya sehingga dapat lebih cepat memberikan informasi kepada masyarakat.

Pihak Lain Yang Terlibat

Perguruan tinggi adalah mitra pemerintah dalam memberikan masukan/rekomendasi program penanggulangan bencana yang dapat memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Keterlibatan dalam Program Destana berupa kehadiran akademisi (dosen) dari perguruan tinggi setempat sebagai narasumber di beberapa kabupaten/kota. Namun keterlibatan swasta dan perguruan tinggi belum dilibatkan secara maksimal sehingga peran ini belum nampak secara utuh.

E-monev

Pelaksanaan E-Monev merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan sehingga progress tahapan kegiatan bisa dipantau kapan pun, di mana pun secara cepat (tepat waktu) sebagai bahan analisis pencapaian kegiatan. Aplikasi berbasis website belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga belum semua fasilitator bisa mengakses E-Monev.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di provinsi Riau secara umum telah mencapai tujuannya, namun selama pelaksanaan tahapan kegiatan telah menghadapi beberapa persoalan yang menjadi tantangan serius dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan analisis terhadap capaian pelaksanaan, hambatan yang telah dilalui, dan tantangan mendatang, maka rekomendasi untuk Program Destana tahun berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
2. Melengkapi perangkat keras berupa peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran.
3. Menyediakan anggaran untuk pelatihan (kontinuitas) pengendalian kebakaran hutan bagi aparat pemerintah, tenaga relawan Desa dan perusahaan kehutanan serta masyarakat sekitar hutan
4. Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai Apel Siaga pengendalian kebakaran hutan.
5. Pemberian pembekalan kepada pengusaha (HPH, HTI, perkebunan dan Transmigrasi), Kanwil Dephut, dan jajaran Pemda oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
6. Dalam setiap persetujuan pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan non kehutanan, selalu disyaratkan pembukaan hutan tanpa bakar.
7. Memberdayakan posko-posko kebakaran hutan di semua tingkatan, serta melakukan pembinaan dan Pelatihan berkelanjutan mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama siaga dan I dan II.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2012). Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112-122.
- Jaya, K. A., Safriadi, N., & Perwitasari, A. (2018). Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur di Kejaksaan Negeri Mempawah. *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, 6(1), 22-27.

- Mendagri RI. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) Kementerian Dalam Negeri RI : Jakarta.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan: sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 1-14.
- Ramadhani, Y. (2019). Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika "JISTI"*, 2(2), 42-51.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*.
- Saharjo BH. 2003. *Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan yang Lestari Perlu dilakukan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.